

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perusahaan atau organisasi yang telah berjalan diharuskan untuk memonitor kegiatan dan hasilnya. Manajemen harus mempunyai pandangan dan sikap profesional untuk memajukan dan meningkatkan hasil yang telah dicapai. Pandangan dan sikap tersebut dinyatakan dalam kesibukan manajemen untuk selalu melihat, meneliti, menganalisa dan mengambil keputusan atas laporan-laporan yang telah sampai ke atas meja mereka. Laporan tersebut digunakan sebagai dasar keputusan baik untuk mengendalikan atau mengarahkan yang mana biasanya berbentuk ringkasan kejadian yang paling terakhir terjadi dan kondisi perusahaan. Satuan pengukurannya tidak hanya menggunakan rupiah tetapi juga satuan jam kerja, satuan berat, penggunaan karyawan dan ukuran lain yang diperlukann. Di samping laporan berfungsi sebagai pengendalian, laporan juga mempunyai arti untuk menilai apakah kebijaksanaan perusahaan yang telah ditentukan berjalan sesuai rencana dan menggambarkan kondisi keuangan yang sehat dan baik serta kegiatan operasional yang berjalan berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

Konsep organisasi yang penting dan mendasar lainnya terdapat dalam hal pengelolaan perusahaan atau organisasi yang diuraikan dalam bentuk peranan manajemen terhadap pengambilan keputusan, otorisasi wewenang, penetapan kebijakan, dan pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan. Pada tahap ini, manajemen harus lebih efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsi utama perusahaan seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), dan pengendalian (*controlling*). Bagian perencanaan mengacu pada pembentukan program operasi yang terinci untuk semua fase operasi. Perencanaan yang efektif didasarkan pada analisis atas fakta-fakta yang dikumpulkan. Bagian pengorganisasian

pada hakikatnya merupakan pembentukan suatu kerangka kerja bagi pelaksanaan kegiatan yang diperlukan. Pengorganisasian akan menjelaskan mengenai penyusunan berbagai unit fungsional perusahaan ke dalam suatu struktur yang dapat dipahami serta kemudian menetapkan wewenang dan tanggung jawab pada orang-orang tertentu. Bagian pengendalian merupakan usaha sistematis perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana. Pengendalian difokuskan terhadap pemantauan kegiatan secara berkala guna untuk memastikan kinerja perusahaan yang dihasilkan (Herman,1992)

Selanjutnya perihal informasi keuangan yang akurat, handal dan tepat waktu merupakan suatu hal yang selalu menjadi perhatian khusus dalam perusahaan maupun organisasi. Hal ini dapat mengukur akuntabilitas perusahaan dalam hal transparansi sehingga menjadi kewajiban manajemen dalam pembuatan dan pemeliharaan sistem pengendalian internal untuk memberikan jaminan yang wajar bagi para pemegang saham bahwasanya perusahaan dikendalikan dengan baik oleh manajemen. Pentingnya sistem pengendalian internal dalam organisasi adalah sebagai alat yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan tertentu. Sistem pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak bagi manajemen bahwa perusahaan atau organisasi telah mencapai tujuan dan sasarannya. Manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, yaitu kehandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta ketaatan pada hukum dan peraturan. Ada dua konsep utama yang melandasi penyusunan dan implementasi pengendalian internal, yaitu kepastian yang layak dan keterbatasan bawaan (inheren). Manajemen harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak, tetapi bukan absolut, bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar (Hery,2013).

Saat ini telah banyak organisasi yang muncul dan berkembang di masyarakat dengan berbagai jenis dan kepentingan yang mana salah satunya adalah organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba adalah organisasi yang berbasis nilai, ditandai dengan adanya fokus pada pelaksanaan misi sosial daripada pencarian keuntungan (Sharp&Brock, 2011). Organisasi nirlaba dapat berupa organisasi keagamaan, sekolah negeri, organisasi kepemudaan, dan organisasi politik. Anthony dan Young dalam Salusu (1996:26) menyebutkan bahwa salah satu karakteristik dari organisasi nirlaba adalah tidak bermotif mencari keuntungan. Berdasarkan karakteristik tersebut, organisasi nirlaba bergantung kepada donasi yang dikumpulkan untuk membiayai seluruh kegiatannya.

Menurut PSAK 45, organisasi nirlaba memperoleh dana dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan dan dari menghasilkan barang dan/atau jasa dengan tidak bertujuan memupuk laba. Jika entitas nirlaba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri atau pemilik entitas nirlaba tersebut. Oleh karena itu, pengukuran dari jumlah sumbangan yang terhitung sebagai pendapatan organisasi dan juga aliran kas merupakan hal yang penting. Organisasi nirlaba juga dapat memperoleh dana dari pemerintah, bantuan dari CSR sebuah perusahaan, dan berbagai sumber dana lainnya. Meskipun terdapat beberapa pilihan sumber pendanaan, organisasi nirlaba tetap memiliki sumber pendanaan yang terbatas sehingga perlu adanya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sehingga dapat membiayai seluruh kegiatan organisasi, khususnya untuk membiayai kegiatan sosial yang dijalankan seperti peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, memberikan akses pendidikan kepada anak-anak kurang mampu, usaha perbaikan lingkungan, dan kegiatan-kegiatan berbasis sosial lainnya.

Berbagai tantangan dapat muncul dalam pengelolaan organisasi nirlaba. Menurut Jonker dan Meehan (2014), tantangan yang dihadapi oleh organisasi nirlaba biasanya

berhubungan dengan tujuan organisasi, pendanaan, *governance*, suksesi kepemimpinan, dan pengukuran kinerja. Permasalahan tersebut menantang usaha organisasi nirlaba dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Permasalahan ini akan semakin menyulitkan jika sebuah organisasi nirlaba memiliki skala operasi yang besar dan dana dengan jumlah yang besar. Di Indonesia organisasi nirlaba cukup berkembang pesat terutama dalam bidang keagamaan dan advokasi yang berkaitan dengan banyaknya kebutuhan dan permasalahan yang terjadi di dalam bermasyarakat.

Pada dasarnya, tingkat akuntabilitas keuangan organisasi nirlaba akan sangat tergantung pada seberapa jauh organisasi tersebut mampu mengendalikan peranan operasional keuangan internal organisasi secara efisien dan efektif yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Pengendalian operasional organisasi akan dibangun berbasis sistem pengendalian internal yang mana memiliki 5 komponen utama pembentuk kerangka pengendalian, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Sistem pengendalian internal akan berperan penting dalam mengontrol dan menjamin kegiatan operasional organisasi dalam semua aspek agar berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.

Secara definisi, pengendalian internal adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur dan tidak terbatas pada metode pengendalian yang dianut oleh bagian akuntansi dan keuangan, tetapi meliputi pengendalian anggaran, biaya standar, program pelatihan pegawai dan staf pemeriksa intern (Zamzami,2012). Tujuan dari pengendalian internal (Zaki,1999) pada studi (Amanina,2011), yaitu menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi operasi perusahaan, membantu menjaga kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu untuk dipatuhi.

Hal ini sering kita dengar dan jumpai dalam perusahaan/organisasi yang berkaitan dengan transparansi laporan keuangan. Berbicara mengenai keuangan dalam perusahaan ataupun organisasi merupakan suatu hal sensitif yang penggunaannya bisa disalahartikan untuk kebutuhan personal karena berkaitan dengan aset likuid perusahaan yang mudah cair, dan apabila tidak ada sistem pengendalian internal yang memadai maka akan sangat merugikan organisasi. Namun permasalahan yang terjadi di lapangan adalah tidak semua organisasi paham akan implementasi dari sistem pengendalian internal termasuk organisasi yang *global* dan besar sekalipun.

Salah satu organisasi nirlaba di Indonesia yang mempunyai skala yang besar dan luas adalah organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI). Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan demokrasi sebagai organisasi massa perempuan yang beranggotakan individu-individu dari berbagai macam kelompok kepentingan, melakukan upaya yang sistematis untuk mewujudkan keadilan dan demokrasi dengan memastikan keterwakilan kelompok kepentingan di semua tingkatan. Organisasi ini telah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dalam bentuk tingkat wilayah, tingkat cabang, dan tingkat balai yang mana pusat tertinggi pada skala tingkat nasional. Seperti organisasi nirlaba lainnya, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) memiliki sumber pendanaan yang terbatas. Sumber pendanaan organisasi diperoleh dari uang pangkal dan iuran anggota, kemudian dari sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan organisasi, serta dari hasil usaha-usaha yang sah.

Hal tersebut membuat Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) perlu untuk mengelola keuangannya melalui implementasi pengendalian internal dalam menjalankan kegiatannya. Penelitian ini ditujukan lebih khusus kepada Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Sumatera Barat yang mana merupakan bagian dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) nasional yang juga mempunyai kegiatan operasional dan pendanaan dalam mewujudkan

tujuan organisasi. Implementasi terhadap pengendalian sistem internal akan menggambarkan efektivitas dari fungsi masing-masing fungsional organisasi. Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat dilakukan penelitian lebih lanjut guna untuk mengetahui seberapa besar peranan sistem pengendalian internal pada Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) wilayah Sumatera Barat. Dari penjelasan terhadap latar belakang masalah maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “EVALUASI EFEKTIVITAS TERHADAP IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PADA ORGANISASI NIRLABA.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi sistem pengendalian internal yang sedang berjalan pada organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)?
2. Bagaimanakah evaluasi terhadap efektivitas implementasi sistem pengendalian internal pada organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)?
3. Apa saja kelemahan atau risiko yang terdapat dalam implementasi sistem pengendalian internal pada Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana implementasi sistem pengendalian internal yang sedang berjalan pada organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
2. Mengetahui bagaimana evaluasi terhadap efektivitas implementasi sistem pengendalian internal pada organisasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).
3. Mengetahui apa saja kelemahan atau risiko yang terdapat dalam implementasi sistem pengendalian internal pada Koalisi Perempuan Indonesia (KPI).

1.4. Manfaat Penelitian

1. Organisasi Nirlaba

Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan suatu panduan yang bermanfaat bagi organisasi nirlaba untuk mengembangkan manajemen kinerja yang lebih baik dan

dapat menjadi panduan untuk menjalankan proses sistem pengendalian internal organisasi.

2. Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang implementasi sistem pengendalian internal pada organisasi nirlaba serta mengetahui peranan penting sistem pengendalian internal dalam mencapai tujuan organisasi nirlaba.

3. Pihak Lain atau Berkepentingan

Hasil penelitian diharapkan berguna bagi siapapun yang ingin mengangkat topik mengenai sistem pengendalian pada sebuah organisasi sebagai penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan sumber referensi mengenai hubungan dengan penelitian ini.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan tinjauan pustaka yang berkaitan serta diperlukan dalam menunjang penelitian atas permasalahan yang dibahas terkait organisasi nirlaba, sistem pengendalian internal dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) secara keseluruhan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan gambaran objek penelitian, metode penelitian meliputi desain penelitian, jenis data dan sumber data, variabel penelitian, dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan dan menguraikan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian berdasarkan analisis pembahasan masalah yang telah ditentukan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dan saran-saran yang didapat sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait.

